

## NARASI GERAKAN SOSIAL: STUDI KASUS FRAMING MEDIA SOSIAL DAN PERAN INFLUENCER DALAM GERAKAN “17+8 DEMANDS” TAHUN 2025 DI INDONESIA

Adinda Prisilia Safitri<sup>1</sup>, Dimas Satrio Piningit<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

### ABSTRAK

#### ARTICLE INFO

##### Article history:

Received Desember, 2025

Revised Desember, 2025

Accepted Desember, 2025

Available Desember, 2025

[2310412177@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310412177@mahasiswa.upnvj.ac.id)  
[2210411278@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210411278@mahasiswa.upnvj.ac.id)

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Penelitian ini membahas bagaimana media sosial berperan dalam membentuk gerakan sosial digital melalui proses framing dan kontribusi para influencer dalam menyebarkan pesan serta membangun opini publik. Studi ini berfokus pada gerakan “17+8 Demands” yang muncul di Indonesia pada tahun 2025 sebagai bentuk kritik publik terhadap kebijakan pemerintah. Gerakan tersebut menjadi salah satu manifestasi nyata dari demokrasi digital, di mana masyarakat menggunakan ruang daring untuk mengekspresikan pendapat, membangun solidaritas, dan menuntut perubahan sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan netnografi, melalui pengamatan terhadap aktivitas pengguna di platform Twitter/X, Instagram, dan TikTok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi framing yang diterapkan melalui narasi moral, visualisasi simbolik, dan penggunaan tagar berhasil menciptakan resonansi publik yang luas. Selain itu, influencer berperan penting sebagai agen komunikasi yang

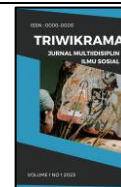
memperluas jangkauan isu serta memperkuat legitimasi moral gerakan. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas gerakan sosial digital bergantung pada kolaborasi antara strategi framing dan peran aktor digital dalam menghubungkan aspirasi masyarakat dengan ruang wacana publik.

**Kata Kunci:** Framing, Media Sosial, Influencer, Gerakan Sosial Digital, Opini Publik.

### ABSTRACT

*This study examines how social media contributes to the formation of digital social movements through framing processes and the role of influencers in disseminating messages and shaping public opinion. The research focuses on the “17+8 Demands” movement that emerged in Indonesia in 2025 as a form of public criticism toward government policies. The movement exemplifies digital democracy, where citizens utilize online spaces to express opinions, build solidarity, and demand social change. This study applies a qualitative descriptive approach with a netnographic method, observing user activities on Twitter/X, Instagram, and TikTok. The findings indicate that framing strategies using moral narratives, symbolic visuals, and hashtags successfully created widespread public resonance. Moreover, influencers play a crucial role as communication agents who amplify issues and strengthen the moral legitimacy of the movement. The study concludes that the effectiveness of digital social movements depends on the collaboration between framing strategies and the role of digital actors in bridging citizens’ aspirations with the public discourse space.*

**Keywords:** Framing, Social Media, Influencer, Digital Social Movement, Public Opinion



## PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, peran media sosial semakin meningkat sebagai medium utama dalam mobilisasi dan penyebaran gerakan sosial di Indonesia. Fenomena ini mencerminkan perubahan signifikan dalam cara masyarakat berpartisipasi dan berkomunikasi dalam isu-isu sosial-politik maupun ekonomi. Tahun 2025 menandai kemunculan gerakan “17+8 Demands,” sebuah gerakan yang lahir sebagai respons terhadap akumulasi ketidakpuasan publik terhadap berbagai problematika sosial dan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat luas.

Gerakan sosial “17+8 Demands” yang muncul di Indonesia pada tahun 2025 merupakan salah satu fenomena sosial-politik yang signifikan dan didukung oleh kekuatan media sosial bersama peran influencer dalam mengangkat isu-isu tersebut ke khalayak luas. Gerakan ini muncul sebagai reaksi terhadap berbagai ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dan kondisi sosial ekonomi yang dinilai memerlukan perubahan mendesak.

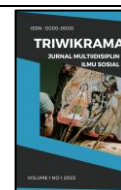
Gerakan sosial “17+8 Demands” dimulai di Indonesia pada tahun 2025 sebagai ekspresi kesadaran kolektif terhadap banyaknya korupsi struktural, ketimpangan ekonomi, dan penurunan kualitas demokrasi setelah reformasi. Selain memobilisasi jutaan orang untuk berpartisipasi dalam demonstrasi fisik, gerakan ini menciptakan narasi dominan di ekosistem media sosial seperti X, TikTok, dan Instagram. Fenomena ini mencerminkan pergeseran paradigma gerakan sosial dari model konvensional ke model digital, di mana framing media memainkan peran penting dalam menentukan persepsi publik (Entman, 1993; Gamson & Modigliani, 1989). Studi ini berkonsentrasi pada peran *influencer* sebagai aktor kunci dalam amplifikasi pesan dan teknik *framing* di media sosial sebagai alat untuk membangun narasi gerakan. *Influencer* berfungsi sebagai penjaga digital yang memengaruhi agenda karena memiliki jangkauan *audiens* yang besar dan kredibilitas yang dibangun melalui konten autentik.

Studi ini berfokus pada strategi framing di media sosial sebagai alat konstruksi narasi gerakan, serta peran *influencer* sebagai aktor kunci dalam amplifikasi pesan. *Influencer*, dengan jangkauan audiens masif dan kredibilitas yang dibangun melalui konten autentik, berfungsi sebagai *gatekeeper* digital yang memengaruhi *agenda-setting* dan priming opini masyarakat (McCombs & Shaw, 1972). Analisis kasus “17+8 Demands” menjadi relevan karena gerakan ini berhasil mencapai viralitas nasional dalam waktu singkat, memicu respons kebijakan pemerintah, sekaligus menimbulkan polarisasi sosial.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode netnografi sebagai landasan utama. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada aktivitas komunikasi digital yang berlangsung di media sosial, khususnya dalam konteks gerakan sosial “17+8 Demands.” Menurut Kozinets (2010), netnografi merupakan adaptasi dari etnografi yang diterapkan pada ruang digital untuk memahami interaksi, budaya, serta praktik komunikasi dalam komunitas daring. Melalui metode ini, peneliti dapat mengamati dan menafsirkan bagaimana pengguna media sosial berinteraksi, membingkai pesan, serta membangun solidaritas digital dalam konteks gerakan sosial.

Pendekatan kualitatif digunakan karena fenomena yang diteliti bersifat interpretatif dan kontekstual. Tujuan dari penelitian ini bukan untuk mengukur frekuensi atau statistik, melainkan untuk memahami makna di balik aktivitas komunikasi dan bagaimana makna tersebut dikonstruksi oleh para aktor digital. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai strategi framing dan peran influencer dalam membentuk opini publik di ruang media sosial.



Penelitian ini dilakukan dengan mengamati aktivitas digital yang berkaitan dengan gerakan “17+8 Demands” di tiga platform utama, yaitu Twitter/X, Instagram, dan TikTok. Ketiga platform ini dipilih karena memiliki karakteristik yang berbeda dalam menyebarkan pesan dan membentuk opini publik. Twitter/X menjadi ruang utama untuk percakapan politik dan penyebaran wacana publik, Instagram digunakan untuk memperkuat visualisasi pesan melalui gambar dan poster digital, sementara TikTok dimanfaatkan sebagai media untuk menyampaikan pesan melalui video pendek yang memiliki jangkauan viral yang luas. Pengamatan dilakukan secara daring selama periode Januari hingga Juli 2025, di mana aktivitas gerakan digital ini menunjukkan puncak partisipasi publik yang signifikan.

Data penelitian dikumpulkan melalui observasi non-partisipan, di mana peneliti tidak terlibat langsung dalam percakapan atau aktivitas digital, tetapi hanya berperan sebagai pengamat. Pengumpulan data dilakukan dengan mendokumentasikan unggahan publik, tanggapan pengguna, dan konten visual yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, peneliti juga mencatat bagaimana narasi dan simbol digunakan untuk membangun makna kolektif di antara para pengguna media sosial. Data sekunder seperti artikel berita, jurnal akademik, dan laporan digital seperti *We Are Social* (2025) digunakan untuk memperkuat hasil observasi serta memberikan konteks terhadap temuan penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis framing yang dikembangkan oleh Gamson dan Modigliani (1989). Model ini menekankan bahwa setiap pesan publik memiliki core frame atau kerangka utama yang membentuk pemaknaan isu. Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada bagaimana kerangka pesan tentang keadilan sosial, transparansi pemerintah, dan hak warga negara dikonstruksi dan disebarluaskan melalui media sosial. Peneliti mengidentifikasi pola bahasa, simbol, serta elemen visual yang digunakan dalam konten digital untuk memahami bagaimana makna sosial terbentuk dan diterima oleh publik.

Keabsahan data dijaga melalui proses triangulasi, baik terhadap sumber maupun waktu pengumpulan data. Data dari berbagai platform dibandingkan untuk memastikan konsistensi temuan, sementara observasi dilakukan secara berulang selama enam bulan untuk melihat dinamika dan perubahan narasi gerakan. Selain itu, peneliti juga melakukan pembacaan silang terhadap berbagai literatur untuk menghindari bias interpretatif. Dengan cara ini, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan valid mengenai dinamika framing media sosial dan peran influencer dalam gerakan sosial digital di Indonesia.

Pemilihan metode netnografi dalam penelitian ini dinilai paling tepat karena fenomena yang dikaji sepenuhnya terjadi di ruang digital. Metode ini memungkinkan peneliti memahami praktik komunikasi masyarakat digital secara alami tanpa mengintervensi jalannya interaksi. Melalui pengamatan yang mendalam, penelitian ini berupaya menggambarkan bagaimana media sosial menjadi ruang baru bagi ekspresi politik dan mobilisasi sosial. Dengan demikian, pendekatan netnografi tidak hanya memberikan pemahaman tentang struktur komunikasi daring, tetapi juga mengungkap makna-makna simbolik yang muncul dari interaksi antar pengguna di dalamnya.

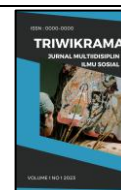
## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan sosial digital “17+8 Demands” merupakan salah satu bentuk manifestasi nyata dari perubahan pola aktivisme di era media baru. Gerakan ini memanfaatkan kekuatan media sosial sebagai ruang artikulasi politik sekaligus sebagai alat untuk membangun solidaritas sosial. Isu utama yang diangkat oleh gerakan ini berfokus pada ketimpangan sosial, transparansi pemerintahan, dan keadilan ekonomi. Melalui penyebaran tagar seperti #17Plus8Demands, #ReformasiDigital, dan #KeadilanSosial, masyarakat berpartisipasi

---

\*Corresponding author

E-mail addresses: [zukhrufii@gmail.com](mailto:zukhrufii@gmail.com)



dalam diskusi publik dan menyuarakan pendapat mereka terhadap kebijakan pemerintah. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana media sosial berfungsi tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai medium resistensi dan pembentukan kesadaran kolektif di ruang digital.

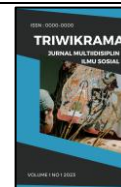
Framing yang dilakukan oleh para pengguna media sosial dalam gerakan ini memperlihatkan pola yang sistematis dan strategis. Narasi utama yang dibangun menekankan pada nilai moral seperti keadilan, solidaritas, dan hak warga negara. Pesan-pesan yang disampaikan melalui teks, gambar, dan video dikonstruksi sedemikian rupa agar menimbulkan resonansi emosional di kalangan publik. Misalnya, banyak pengguna yang mengunggah poster digital berwarna monokrom dengan tulisan yang menegaskan tuntutan terhadap pemerintah. Narasi seperti “suara rakyat bukan sekadar tagar” dan “kita menuntut keadilan, bukan perhatian” menjadi simbol moral yang menyatukan partisipan dalam gerakan tersebut. Melalui strategi ini, framing media sosial berhasil mengubah isu kebijakan yang kompleks menjadi narasi sederhana yang mudah dipahami oleh publik luas.

Selain itu, analisis menunjukkan bahwa proses framing dalam gerakan ini tidak bersifat top-down, melainkan terbentuk secara kolektif melalui partisipasi pengguna media sosial. Siapa pun dapat menjadi pembuat makna dengan menafsirkan dan menyebarkan kembali pesan yang relevan dengan pandangan pribadi mereka. Hal ini sejalan dengan konsep *collective framing* yang dikemukakan oleh Snow dan Benford (1988), di mana pembentukan makna sosial tidak hanya dilakukan oleh pemimpin gerakan, tetapi juga oleh peserta yang terlibat di dalamnya. Dengan demikian, media sosial berfungsi sebagai arena terbuka tempat makna dinegosiasikan, disebarluaskan, dan dimodifikasi sesuai dengan konteks sosial yang berkembang.

Peran influencer menjadi salah satu faktor penting yang memperkuat keberhasilan gerakan sosial digital ini. Influencer berperan sebagai penghubung antara aktivis digital dan masyarakat umum. Melalui gaya komunikasi yang personal, mereka mampu menerjemahkan isu-isu sosial yang kompleks menjadi pesan yang lebih ringan dan mudah diterima oleh audiens. Misalnya, beberapa influencer dengan latar belakang aktivis, jurnalis, maupun figur publik menggunakan akun mereka untuk memberikan penjelasan mengenai isi tuntutan “17+8 Demands.” Mereka juga mendorong diskusi melalui kolom komentar dan live discussion yang memungkinkan pengikut mereka untuk terlibat langsung dalam percakapan. Keberadaan influencer dengan kredibilitas tinggi menjadikan isu gerakan ini lebih mudah diterima dan mendapatkan perhatian dari media arus utama.

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat dua pola utama dalam keterlibatan influencer. Pertama, influencer makro yang memiliki jumlah pengikut besar cenderung berperan dalam memperluas jangkauan pesan dan meningkatkan kesadaran publik terhadap isu yang diangkat. Kedua, influencer mikro berperan dalam memperkuat interaksi komunitas kecil melalui diskusi yang lebih intens dan mendalam. Meskipun kedua jenis influencer ini memiliki strategi komunikasi yang berbeda, keduanya berkontribusi dalam membangun legitimasi moral gerakan. Kolaborasi antara berbagai lapisan influencer menciptakan jaringan komunikasi yang luas dan dinamis, memperlihatkan bagaimana kekuatan jejaring sosial bekerja dalam memobilisasi dukungan publik.

Selain peran influencer, dinamika komunikasi publik dalam gerakan “17+8 Demands” juga dipengaruhi oleh algoritma media sosial. Algoritma berperan dalam menentukan sejauh mana pesan gerakan dapat terlihat oleh pengguna lain. Konten dengan interaksi tinggi, seperti video pendek dengan narasi emosional atau postingan dengan visual kuat, cenderung mendapatkan visibilitas lebih besar di platform seperti TikTok dan Instagram. Akibatnya, framing pesan yang menarik secara visual menjadi kunci penting dalam strategi penyebaran isu. Fenomena ini menunjukkan bagaimana logika algoritmik memengaruhi arah wacana publik, di mana keberhasilan gerakan digital tidak hanya ditentukan oleh substansi pesan, tetapi juga oleh kemampuan adaptasi terhadap mekanisme teknologis media sosial.



Dari sisi partisipasi publik, hasil penelitian memperlihatkan bahwa keterlibatan dalam gerakan sosial digital sebagian besar bersifat simbolik. Banyak pengguna yang menunjukkan dukungan dengan cara mengunggah ulang konten, menggunakan tagar, atau memberikan komentar positif tanpa terlibat langsung dalam aktivitas advokasi offline. Fenomena ini dikenal dengan istilah *slacktivism*, yaitu bentuk aktivisme digital yang ditandai dengan keterlibatan rendah namun memiliki dampak besar dalam membangun kesadaran sosial (Morozov, 2011). Walaupun terbatas dalam tindakan nyata, partisipasi simbolik ini tetap penting karena menjadi indikator munculnya kesadaran politik di kalangan masyarakat digital.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa framing moral yang dilakukan oleh pengguna dan influencer berkontribusi dalam membentuk opini publik yang lebih empatik terhadap isu sosial. Melalui penyajian isu dalam bentuk narasi emosional, publik diajak untuk melihat kebijakan pemerintah dari sudut pandang keadilan dan kemanusiaan. Hal ini memperkuat pandangan bahwa media sosial bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga ruang moral di mana nilai-nilai sosial dinegosiasikan dan disebar. Keterlibatan masyarakat dalam gerakan digital seperti “17+8 Demands” menunjukkan adanya transformasi dalam bentuk partisipasi politik di Indonesia, di mana warga kini memiliki ruang untuk berbicara dan menuntut perubahan tanpa harus bergantung pada lembaga formal.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan gerakan sosial digital bergantung pada kombinasi antara strategi framing yang kuat, peran influencer yang efektif, serta kemampuan mengelola narasi di tengah logika algoritma media sosial. Framing memberikan makna dan arah bagi gerakan, sementara influencer menjadi mediator yang menjembatani pesan dengan publik. Keduanya bekerja secara sinergis dalam menciptakan ruang partisipasi baru di ranah digital. Dengan demikian, gerakan sosial digital seperti “17+8 Demands” tidak hanya menjadi fenomena komunikasi, tetapi juga cerminan perubahan struktur sosial dan politik di era masyarakat jaringan.

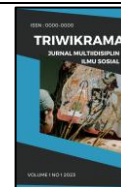
## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa gerakan sosial digital “17+8 Demands” merupakan cerminan nyata dari pergeseran bentuk partisipasi masyarakat dalam ruang publik yang kini dimediasi oleh teknologi digital. Melalui strategi framing dan peran aktif influencer, gerakan ini mampu membangun kesadaran kolektif, memperkuat solidaritas daring, serta membentuk opini publik yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Framing dalam gerakan ini dilakukan secara moral dan emosional, menggunakan simbol, tagar, serta narasi sederhana yang mudah diterima publik luas. Strategi komunikasi tersebut menjadikan gerakan digital bukan hanya sebagai bentuk ekspresi politik, tetapi juga sebagai sarana edukasi sosial dan pembentukan kesadaran baru di kalangan masyarakat.

Peran influencer menjadi faktor penting yang memperluas dampak gerakan. Mereka tidak hanya bertugas menyebarkan pesan, tetapi juga memberikan legitimasi moral melalui kedekatan personal dengan audiens. Kemampuan influencer untuk menyampaikan pesan dalam gaya komunikasi yang autentik dan membaurkan isu yang kompleks dapat diakses oleh kelompok masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian, peran mereka memperkuat hubungan antara aktivisme digital dan publik, menciptakan ruang partisipatif yang lebih terbuka dalam praktik demokrasi digital.

Meskipun sebagian besar partisipasi publik dalam gerakan ini bersifat simbolik atau terbatas pada aktivitas daring, fenomena ini tetap memiliki nilai penting karena menandai munculnya



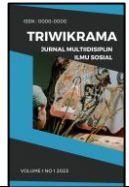


bentuk baru keterlibatan sosial di era digital. Dukungan dalam bentuk unggahan, komentar, dan penggunaan tagar menunjukkan bahwa kesadaran politik masyarakat sedang tumbuh dan bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi komunikasi. Gerakan seperti “17+8 Demands” membuktikan bahwa ruang digital kini telah menjadi arena baru dalam perjuangan sosial, di mana setiap individu dapat berkontribusi dalam membangun narasi keadilan dan transparansi tanpa harus terikat pada struktur organisasi formal.

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan gerakan sosial digital bergantung pada sinergi antara tiga elemen utama, yaitu strategi framing yang mampu membangun makna kolektif, peran influencer yang memperkuat legitimasi dan jangkauan pesan, serta partisipasi masyarakat yang menciptakan resonansi moral di ruang publik digital. Ketiganya berinteraksi secara dinamis dalam membentuk opini publik dan memperluas ruang demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar gerakan sosial digital di masa depan dapat mengintegrasikan pendekatan komunikasi strategis dengan upaya advokasi kebijakan agar gerakan yang dimulai dari media sosial dapat menghasilkan perubahan nyata dalam kebijakan publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Detik.com. (2025, September 3). Ramai 17+8 Tuntutan Rakyat di Medsos, Ini Arti dan Isinya. <https://www.detik.com/bali/berita/d-8095817/ramai-17-8-tuntutan-rakyat-di-medsos-ini-arti-dan-isi-lengkapny>.
- Kumparan.com. (2024, August 27). Influencer dan Gerakan Sosial. <https://kumparan.com/hidayatus-syukriah/influencer-dan-gerakan-sosial-23PMrSWJgKY>.
- Ui.ac.id. (n.d.). Gerakan Sosial dalam Perspektif Framing. <https://lib.ui.ac.id/file?file=pdf%2Fabstrak-20364586.pdf>.
- Mendelsohn, J., Vijan, M., Card, D., & Budak, C. (2024). Framing social movements on social media: Unpacking diagnostic, prognostic, and motivational frames [Preprint]. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2406.13820>
- Nofrima, S., & Qodir, Z. (2021). Influencer dan demokratisasi politik digital di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Global*, 10(2), 155-169.
- Rustandi, A., & Muchtar, M. (2020). Peran influencer dalam komunikasi politik digital. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 18(1), 45-58.
- Snow, D. A., & Benford, R. D. (1988). Ideology, frame resonance, and participant mobilization. *International Social Movement Research*, 1, 197-217.
- Tufekci, Z. (2017). *Twitter and tear gas: The power and fragility of networked protest*. Yale University Press.
- We Are Social. (2025). Digital report Indonesia 2025. Retrieved from <https://wearesocial.com>
- Castells, M. (2015). *Networks of outrage and hope: Social movements in the Internet age*. Cambridge: Polity Press.
- Gamson, W. A., & Modigliani, A. (1989). Media discourse and public opinion on nuclear power. *American Journal of Sociology*, 95(1), 1-37.



---

Goffman, E. (1974). *Frame analysis: An essay on the organization of experience*. Cambridge: Harvard University Press.

Keller, E., & Berry, J. (2003). *The Influentials: One American in ten tells the other nine how to vote, where to eat, and what to buy*. New York: Free Press.

Kozinets, R. V. (2010). *Netnography: Doing ethnographic research online*. Thousand Oaks: Sage Publications.

Morozov, E. (2011). *The net delusion: The dark side of internet freedom*. New York: PublicAffairs.